

# **PENERAPAN E-PROCUREMENT DALAM PROSES PENGADAAN BARANG/JASA DI KABUPATEN MALANG**

(Studi Pada Bidang Asset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang)

**Amelia Iftitah Damayanti<sup>1</sup>, Tjahjanulin Domai<sup>1</sup>, Abdul Wachid<sup>1</sup>**

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang  
e-mail: Queen\_theeta@yahoo.com

**Abstract: The Application Of E-Procurement In The Process For Procurement Of Goods /Services In Malang.** The main problem being the subject of this thesis is the procurement of goods/services through electronic systems, namely e-Procurement in Malang Counties. The background was made in this study is to see how e-Procurement undertaken by Malang in particular areas of the Revenue Agency Asset Management of financial and Asset. This research uses qualitative research with type a descriptive approach. Data sources used are primary data and secondary data. This research resulted in a conclusion that e-Procurement undertaken by DPPKA in particular The Asset has not reached the maximum, it is based on research results in the field. The authors provide solutions related to the implementation of e-Procurement in the process of procurement of goods/services in Malang consists of: Dissemination of goods/services procurement process electronically (e-procurement), the need for increased cooperation from all parties for the mechanism and process of supervision, monitoring and evaluation, the provision of facilities and infrastructure adequate technology particularly as supporting system of e-Procurement.

**Keywords:** e-Procurement, the procurement of goods/services, asset

**Abstrak: Penerapan E-Procurement Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Malang.** Masalah utama yang menjadi bahasan dari skripsi ini adalah pengadaan barang/jasa melalui Sistem Elektronik yaitu e-Procurement di Kabupaten Malang. Latar belakang yang diangkat dalam penelitian ini yaitu untuk melihat bagaimana e-Procurement yang dilakukan oleh Kabupaten Malang khususnya Bidang Asset Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Asset. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Penelitian ini menghasilkan suatu kesimpulan bahwa e-Procurement yang dilakukan oleh DPPKA khususnya Bidang Asset belum mencapai maksimal, hal ini didasarkan hasil penelitian di lapangan. Penulis memberikan solusi terkait penerapan e-Procurement dalam proses pengadaan barang/jasa di Kabupaten Malang terdiri dari: Sosialisasi mengenai proses pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement), Perlu adanya peningkatan kerjasama untuk dari semua pihak dalam mekanisme dan proses pengawasan, monitoring serta evaluasi, penyediaan sarana dan prasarana teknologi yang lebih memadai khususnya sebagai penunjang sistem e-Procurement.

**Kata kunci:** e-Procurement, pengadaan barang/jasa, asset

---

## **Pendahuluan**

Sejak lahirnya Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menandai adanya reformasi di bidang Pengelolaan Keuangan Negara, kemudian adanya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah menandakan bahwa adanya amanat untuk aparatur pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah untuk melaporkan keuangan yang

transparan, wajar serta dapat dipertanggungjawabkan. Laporan keuangan yang transparan, wajar serta dapat dipertanggungjawabkan tersebut dipengaruhi oleh ketepatan pelaporan dan penatausahaan asset tetap. Hal tersebut dikarenakan asset tetap pemerintah memiliki peranan yang besar dalam sebuah neraca pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Dengan adanya peranan atau proporsi yang besar dalam

asset tetap pemerintah, maka Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mempunyai perhatian yang besar juga terhadap asset tetap yang diungkapkan dalam laporan keuangan.

Seiring pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pesat disertai dengan pengembangan otonomi daerah, kebutuhan pemerintah akan penyelenggaraan pemerintahan turut meningkat. Kebutuhan pemerintah tersebut dapat secara materiil maupun non materiil. Kebutuhan tersebut terwakili melalui proses pengadaan barang/jasa. Namun dalam pelaksanaannya dirasa masih banyak kendala seperti yang terdapat pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang selaku pembantu pengelola Barang Milik Daerah. Mulai per Januari 2012 seluruh instansi di Kabupaten Malang diwajibkan untuk menggunakan Pengadaan Elektronik yaitu dengan menerapkan *e-Procurement*. Pengadaan elektronik tersebut diatur dalam Perpres No.70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Dengan adanya pengadaan elektronik tersebut diharapkan nantinya mampu mewujudkan pasar pengadaan yang transparan, terbuka, menyatu, bersaing sehat serta tertata.

*E-procurement* tersebut diperlukan agar Pengadaan Barang/Jasa yang diselenggarakan Pemerintah dapat terlaksana dengan baik, sehingga dapat meningkatkan dan menjamin terjadinya efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dalam pembelanjaan uang negara. Dengan demikian ketersediaan barang/jasa dapat diperoleh dengan harga dan kualitas terbaik, proses administrasi yang lebih mudah dan cepat, serta dengan biaya yang lebih rendah, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan public. adanya permasalahan pada rekanan yang belum pernah menggunakan sistem elektronik dan tidak memahami dalam pengadaan barang/jasa dirasa juga dapat menghambat kegiatan tersebut. Selanjutnya dalam pelaksanaannya pada

sistem aplikasi, saat digunakan untuk proses pengadaan barang/jasa, *server error* bahkan bisa sampai mati yang mengakibatkan *traffic jam*, hal tersebut dikarenakan kelebihan kapasitas serta banyaknya instansi yang menggunakan sistem aplikasi tersebut. Selain itu juga sistem komputer untuk *e-Procurement* sering macet di saat menjelang *deadline tender*, hal ini salah satunya disebabkan oleh banyaknya aplikasi yang masuk dikarenakan para peserta lelang menunggu hingga menjelang batas akhir waktu penawaran dalam memasukkan aplikasi karena takut penawarannya dibocorkan ke pihak lain.

Dengan memperhatikan latar belakang diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan *e-Procurement* dalam pengadaan barang/jasa di Kabupaten Malang?
2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapan *e-Procurement* pada pengadaan barang/jasa di Kabupaten Malang?

## **Tinjauan Pustaka**

### **1. Administrasi Publik**

Rosenbloom (2005) dikutip oleh Harbani (2010, h.8) mengartikan administrasi publik adalah pemanfaatan teori-teori dan proses-proses manajemen, politik dan hukum untuk memenuhi keinginan pemerintah di bidang legislative, dalam rangka fungsi pengaturan dan pelayanan masyarakat secara keseluruhan atau sebagian.

### **2. Peranan Administrasi Publik**

Peranan administrasi publik Menurut Widjaja (2005, h.4) “peranan administrasi publik tidak cukup hanya dalam konsep dan teori semata, tetapi benar-benar dapat mewujudkan suatu disiplin ilmu (ilmu administrasi) yang mampu memecahkan masalah yang semakin kompleks dan rumit, khususnya dalam pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah”. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa peran administrasi publik sangat diperlukan untuk keseimbangan wewenang dalam rangka otonomi daerah yang bertujuan pada pelayanan dan kesejahteraan umum sebagai

salah satu bentuk pencerminan negara demokrasi.

### **3. Barang/Asset Milik Daerah**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dimaksud dengan Barang Milik Daerah adalah semua barang yang di beli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

#### **a. Azas-azas Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Pada Modul Diklat Teknis Manajemen Asset Daerah milik Dinas Pengelolaan milik Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset (2012, h.8) , pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asaz: Azas Fungsional, Azas kepastian hukum, Azas Transparansi, Azas Efisiensi, Azas Akuntabilitas, Azas kepastian nilai.

#### **b. Mekanisme Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Di dalam pengelolaan barang milik daerah, terdapat beberapa mekanisme yang menjadi penggerak pengelolaan barang milik daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, antara lain: Perencanaan kebutuhan dan anggaran ,Pengadaan, Penerimaan, Penyimpanan, dan Penyaluran, Penggunaan ,Penatausahaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian,Penghapusan, Pemindahtanganan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, Pembiayaan, Tuntutan Ganti Rugi.

### **4. Sistem Informasi Manajemen**

#### **a. Pengertian Sistem**

Sistem menurut FitzGerald dikutip oleh Jogiyanto (2005, h.1) adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. Sedangkan

menurut Jogiyanto (2005, h.2) sistem merupakan kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

#### **b. Informasi**

Informasi ibarat darah yang mengalir di dalam tubuh suatu organisasi, sehingga informasi ini sangat penting di dalam suatu organisasi. Suatu sistem yang kurang mendapatkan informasi akan menjadi luruh,kerdil dan akhirnya berakhir. Jogiyanto (2005, h.8) mengemukakan informasi merupakan data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya.

#### **c. Sistem Informasi Manajemen**

Konsep dasar sistem informasi merupakan hal yang sangat penting bagi manajemen didalam pengambilan keputusan. Sistem Informasi didefinisikan oleh Leitch dan Davis dikutip Jogiyanto (2005, h.11) sebagai berikut:

“Sistem Informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan”.

Sedangkan sistem informasi manajemen merupakan penerapan sistem informasi didalam organisasi untuk mendukung informasi-informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkatan manajemen.

Menurut Cushing dikutip oleh Jogiyanto, Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah :

“Suatu sistem informasi manajemen adalah Kumpulan dari manusia dan sumber daya modal di dalam suatu organisasi yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengolah data untuk menghasilkan informasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen di dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian.” (Jogiyanto,2005, h.14).

## 5. Sistem Pengadaan Kontemporer

### a. Electronic Procurement (e-Procurement)

Menurut Willem (2012, h.80) pengadaan secara elektronik (*e-Proc*) merupakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan jaringan elektronik (jaringan internet atau intranet) atau *electronic data interchange* (EDI).

### b. Tujuan e-Procurement

Adapun tujuan dari adanya e-Procurement yang dikemukakan oleh Willem (2012, h.80) sebagai berikut:

Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha, Meningkatkan tingkat efisiensi proses pengadaan, Mendukung proses monitoring dan audit, Memenuhi kebutuhan akses informasi terkini.

### c. Metode Pelaksanaan e-Procurement

Dalam kegiatan *e-Procurement* terdapat metode-metode pelaksanaannya seperti yang disebutkan oleh Willem (2012, h.81) yaitu:

#### 1) e-Tendering

*e-Tendering* adalah tata cara pemilihan pemasok yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua pemasok yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik.

#### 2) e-Bidding

*e-Bidding* merupakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan cara penyampaian informasi dan/atau data pengadaan dari penyedia barang dan jasa, dimulai dari pengumuman sampai dengan pengumuman hasil pengadaan, dilakukan melalui media elektronik antara lain menggunakan media internet, intranet dan/atau *electronic data interchange* (EDI).

#### 3) e-Catalogue

*e-Catalogue* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang dan jasa.

#### 4) e-Purchasing

*e-Purchasing* adalah tata cara pembelian barang dan jasa melalui sarana *e-Catalogue*.

### Metode Penelitian

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif pendekatan deskriptif. Moleong (2009, h.6) berpendapat penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Pada penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Kabupaten Malang dan yang menjadi situs penelitian adalah Bidang Asset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan Model Interaktif Analisis Data Milles Dan Huberman (1991, h.20) yaitu Reduksi data, Display atau penyajian data dan Verifikasi data atau penarikan kesimpulan.

### Pembahasan

Pengadaan barang/jasa melalui sistem elektronik yaitu e-Procurement merupakan alat bantu dalam melaksanakan kegiatan pengadaan, seperti pendapat yang dikemukakan oleh Willem (2012, h.80) pengadaan secara elektronik (*e-Proc*) merupakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan jaringan elektronik (jaringan internet atau intranet) atau Electronic Data Interchange (EDI). Pengadaan secara elektronik tersebut diharapkan mampu membantu serta meningkatkan kualitas kinerja pegawai dalam melakukan proses pengadaan. Pengadaan secara elektronik melalui e-Procurement sendiri diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden

Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menjelaskan bahwa Pengadaan secara elektronik atau *E-Procurement* merupakan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

Adapun tujuan dari adanya *e-Procurement* yang dikemukakan oleh Willem (2012, h.80) sebagai berikut:

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
2. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha
3. Meningkatkan tingkat efisiensi proses pengadaan
4. Mendukung proses monitoring dan audit
5. Memenuhi kebutuhan akses informasi terkini.

Di dalam penerapan *e-Procurement* dalam pengadaan barang/jasa dirasa masih ada kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu perlu adanya pengawasan, monitoring serta evaluasi dari hasil pengadaan secara elektronik dan melakukan analisis sistem *e-Procurement* sendiri, untuk mengetahui adanya kekurangan dari sistem tersebut.

#### **1. Mekanisme pengadaan barang/jasa melalui *E-Procurement* di Kabupaten Malang**

Mekanisme pengadaan barang/jasa sebaiknya mengacu pada prinsip-prinsip manajemen aset daerah, seperti yang dikemukakan oleh Mahmudi (2010, h. 57) Prinsip pokok yang harus diperhatikan dalam manajemen aset daerah adalah Pemerintah Daerah harus melakukan manajemen aset tersebut sejak tahap perencanaan sampai tahap penghapusan aset. Semua tahap tersebut harus terdokumentasi dengan baik. Dari pendapat tersebut, dalam proses mekanisme pengadaan barang/jasa melalui *e-Procurement* seharusnya dapat dilakukan secara tertib, sehingga dengan adanya sistem *e-Procurement* dapat membuat kegiatan pengadaan barang/jasa menjadi lebih maksimal lagi.

Kemudian dalam mekanisme pengadaan barang/jasa melalui *e-*

*Procurement* seharusnya memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan seperti menurut Willem (2012, h.11-12) sebagai berikut yang juga telah dilaksanakan oleh DPPKA Kabupaten Malang, yaitu:

1. Efisien  
Pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana, daya dan fasilitas yang sekecil-kecilnya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi keuntungan negara.
2. Efektif  
Sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
3. Kompetitif  
Dilakukan melalui seleksi dan persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas serta transparan.
4. Transparan  
Semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang atau jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang atau jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang atau jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.
5. Bertanggungjawab  
Mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan prinsip-prinsip dan kebijakan serta ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan rantai suplai.

Kegiatan *e-Procurement* tersebut tidak terlepas dari sistem informasi yang membantu dalam pengerjaan pengadaan barang/jasa, seperti yang dikemukakan oleh Leitch dan Davis dikutip oleh Jogyanto (2005, h.11) Sistem informasi adalah suatu sistem didalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar

tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.

## **2. Pengawasan, monitoring serta evaluasi terhadap pengadaan barang/jasa melalui *E-Procurement* di Kabupaten Malang.**

Proses pengawasan, monitoring serta evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah kegiatan pengadaan melalui *e-Procurement* sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada ataukah justru belum mencapai kesesuaian dalam peraturan. Selanjutnya dari hasil pengawasan, monitoring serta evaluasi akan diketahui kekurangan-kekurangan dan kendala yang ada dalam pelaksanaan *e-Procurement*, sehingga setelah adanya proses pengawasan, monitoring serta evaluasi akan dilakukan perbaikan-perbaikan serta pengembangan sistem. Mengingat *e-Procurement* merupakan sistem yang baru dipakai dalam pengadaan setelah menggunakan pengadaan secara konvensional atau manual. Seperti pendapat yang dikemukakan Jogiyanto (2005, h.35) Pengembangan sistem (system development) dapat berarti menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada, sistem yang lama perlu diperbaiki atau diganti disebabkan beberapa kekurangan dari sistem tersebut.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan melakukan analisis sistem berupa pengawasan dan monitoring akan diketahui kekurangan dari aplikasi *e-Procurement* dalam proses pengadaan barang/jasa. Setelah mengetahui apa saja kekurangan dari aplikasi *e-Procurement*, maka akan dapat dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki kembali kekurangan-kekurangan tersebut yang ada pada aplikasi *e-Procurement*. Permasalahan-permasalahan yang timbul pada sistem yang lama menurut Jogiyanto (2005, h.35) dapat berupa:

Ketidakberesan dalam sistem yang lama menyebabkan sistem yang lama tidak dapat beroperasi sesuai dengan yang diharapkan, ketidakberesan ini dapat berupa:

Kecurangan-kecurangan disengaja, Tidak efisiennya operasi, Pertumbuhan organisasi

yang menyebabkan harus disusunnya sistem yang baru.

## **3. Dampak dari adanya *E-Procurement* dalam proses pengadaan barang/jasa Kabupaten Malang**

Dalam sebuah penerapan sistem elektronik pada proses apapun itu pasti memiliki dampak tertentu. Disini pada proses pengadaan barang/jasa melalui *e-Procurement* juga memunculkan dampak yaitu berupa dampak positif didalam pelaksanaannya. Hal ini menandakan bahwa sistem elektronik merupakan bagian dari sistem informasi yang memiliki peranan bagi manajemen, seperti yang dikemukakan oleh Jogiyanto (2005, h.18) Manajemen membutuhkan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan yang akan dilakukan sumber informasi eksternal dan informasi internal. Informasi internal dapat diperoleh dari sistem informasi berupa informasi yang dihasilkan dari operasi pengolahan data elektronik (PDE) dan informasi Non PDE. Selanjutnya ada beberapa manfaat atau peranan serta fungsi sistem informasi antara lain adalah :

- a) Meningkatkan aksesibilitas data.
- b) Menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis.
- c) Mengembangkan proses perencanaan yang efektif.
- d) Mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi.
- e) Menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi.
- f) Mengantisipasi dan memahami konsekuensi-konsekuensi ekonomis dari sistem informasi dan teknologi baru.
- g) Memperbaiki produktivitas dalam aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem.
- h) Organisasi menggunakan sistem informasi.

Secara garis besar, dampak yang terlihat dari adanya sistem *e-Procurement* ialah terjadinya efisiensi dan efektifitas biaya serta waktu. Karena melihat sistem yang digunakan sebelumnya menggunakan sistem konvensional atau manual, waktu

yang diperlukan cukup banyak karena hampir seluruh kegiatan dilakukan dengan bertatap muka yang tentunya memakan banyak waktu serta biaya.

#### **4. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penerapan E-Procurement Pada Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Malang**

Pada penerapan sistem *e-Procurement* dalam pengadaan barang/jasa di Kabupaten Malang khususnya di DPPKA, terdapat 2 kendala yang diantaranya:

*Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Khususnya Panitia Pengadaan Yang Tidak Mengerti Tentang Sistem Elektronik*

Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berlatar belakang sistem elektronik atau sistem informasi manajemen mengakibatkan kurangnya tanggungjawab karena tidak mengetahui secara jelas bagaimana penerapan sistem elektronik pada kegiatan pengadaan barang/jasa. Seperti halnya yang diungkapkan oleh

Menurut Cushing dikutip oleh Jogiyanto (2005, h.14) mengenai Sistem Informasi Manajemen (SIM) merupakan :

Suatu sistem informasi manajemen adalah Kumpulan dari manusia dan sumber daya modal di dalam suatu organisasi yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengolah data untuk menghasilkan informasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen di dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian”.

*Sistem Aplikasi Pelaksanaan e-Procurement Yang Kurang Berfungsi Dengan Baik*

Sistem aplikasi *e-Procurement* juga memegang peranan penting dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Kegiatan tersebut juga sangat memerlukan kesiapan teknologi informasi secara penuh berikut perangkat-perangkatnya.

“Telah diketahui bahwa informasi merupakan hal yang sangat penting bagi manajemen di dalam pengambilan keputusan. Informasi dapat diperoleh dari sistem informasi (*information systems*) atau disebut juga dengan *processing systems* atau *information processing systems* atau

*information-generating systems.”*  
Jogiyanto(2005, h.11)

Sistem aplikasi menjadi kendala dalam sistem *e-Procurement* khususnya pada DPPKA di Kabupaten Malang. Sistem aplikasi pada dasarnya memiliki peranan mengatasi permasalahan pada sebuah program, seperti halnya yang dikatakan oleh Tirtobisono (1999, h.21) aplikasi merupakan suatu program yang ditulis atau dibuat untuk menangani masalah tertentu.

#### **Penutup**

Proses pengadaan barang/jasa pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) Bidang Asset di Kabupaten Malang selaku pengelola asset atau barang milik daerah telah menerapkan sistem elektronik per Januari 2012 sebagai alat bantu untuk kegiatan pengadaan yaitu berupa *e-Procurement* dalam proses pengelolaan asset atau barang milik daerah. Sebagai pergantian sistem yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu pengadaan melalui sistem konvensional atau manual.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka secara garis besar peneliti menyimpulkan :

- a) Mekanisme pada pengadaan barang/jasa secara elektronik yaitu *e-Procurement* menggunakan tata cara yang efektif bagi para pegawai khususnya di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) Kabupaten Malang, mengingat tata cara pada *e-Procurement* tersebut lebih menghemat waktu serta biaya.
- b) Kemudian untuk proses pengawasan, monitoring serta evaluasi pengadaan barang/jasa melalui *e-Procurement* yang dilaksanakan oleh DPPKA khususnya bidang asset dilakukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang diperantarai oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sudah berjalan dengan baik dengan diadakannya kegiatan tersebut disetiap akhir tahun.
- c) Dalam penerapan *e-Procurement* berdampak pada proses pengadaan barang/jasa. Dampak yang ditimbulkan adalah dampak positif yang sangat membantu para pegawai khususnya

panitia pengadaan barang/jasa dalam melaksanakan tugasnya, sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Kemudian dampak negatif untuk pihak rekanan yaitu adanya sebagian rekanan yang belum memahami dan biasa menggunakan sistem elektronik utamanya menggunakan internet.

- Yang Tidak Mengerti Tentang Sistem Elektronik;
- b) Sistem Aplikasi Pelaksanaan e-Procurement Yang Kurang Berfungsi Dengan Baik.

Kendala dalam pengadaan barang/jasa melalui e-Procurement adalah:

- a) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Khususnya Panitia Pengadaan

---

## Daftar Pustaka

- Jogiyanto.HM.(2005)**Sistem Teknologi Informasi: Pendekatan Terintegrasi:Konsep dasar,teknologi,aplikasi, pengembangan dan pengelolaan. Edisi 2.**Yogyakarta. Andi Offset
- Mahmudi.(2010) **Manajemen Keuangan Daerah.** Jakarta. Erlangga
- Milles dan Huberman.(1992)**Analisis Data Kualitatif (terjemahan).** Jakarta. UI Press
- Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset. Modul 1 : (2012) **Dasar-dasar Manajemen Aset/Barang Milik Daerah, Diklat Teknis Manajemen Asert Daerah (Asset Management-Physical)**
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah**
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Pasal 4 Ayat 2 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Barang Milik Daerah**
- Widjaja, HAW. (2005)**Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia.** Jakarta. Raja Grafindo Persada
- Willem, Siahaya. (2012)**Manajemen Pengadaan, Procurement Management.** Bandung. Alfabeta